

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. MARLYNA, M.Si., CRA., CRP., CGCAE

NIP : 19670115 198603 2 008

Jabatan : INSPEKTUR

Instansi : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dengan ini menyatakan bahwa, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini telah disesuaikan dengan hasil penyesuaian dan verifikasi dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 bersama Tim Verifikator dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 30 Juli 2022

  
**INSPEKTUR**  
  
Dra. MARLYNA, M.Si., CRA., CRP., CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP 19670115 198603 2 008

PERSETUJUAN KETUA TIM VERIFIKATOR  
RENJA PERANGKAT DAERAH

(.....)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan kemudahan yang telah diberikan bagi kita semua, sehingga dengan Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Inspektorat disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat ini mengacu pada Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 dan dijabarkan dalam satu periode, yaitu tahun 2023 secara sistematis.

Dalam melaksanakan kegiatan selama periode 2023, Inspektorat merencanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 61 (enam puluh satu) Subkegiatan. Dimana dalam program - program tersebut menggambarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Demikian rencana kerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi khususnya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke depan pada umumnya sehingga dapat mewujudkan *good governance* dan *clean government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

  
INSPEKTUR  
  
**Dra. MARLYNA, M.Si., CRA., CRP., CGCAE**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19670115 198603 2 008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 danCapaian Rencana Strategis Inspektorat.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat.....	74
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	80
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	80
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	80
3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.....	81
3.4 Program dan Kegiatan.....	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	87
4.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	87
BAB V PENUTUP .....	91



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat (Renstra Perubahan) .....	8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat .....	29
Tabel 2.3 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat .....	36
Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat.....	75
Tabel 3.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat .....	81
Tabel 3.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat .....	82
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat .....	84
Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat .....	88



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Penyusunannya, Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan melalui tahap persiapan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 serta Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam proses penyusunan, dokumen Renja telah disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu,



program dan kegiatan yang akan dilaksanakan telah disesuaikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022 serta mengacu pada arah kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sesuai Permendagri Nomor 48 Tahun 2021.

Oleh karena itu, penyusunan Renja ini memperhatikan hasil kinerja program/kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor pembangunan, koordinasi antar Perangkat Daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya.

Dokumen Renja Perangkat Daerah berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah serta sumber pendanaannya yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran tahunan, Renja Perangkat Daerah Inspektorat perlu mengikuti kerangka pedoman penyusunan anggaran tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020. Hal ini juga untuk memastikan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat diterjemahkan secara konsisten pada proses penganggaran tahunan, perumusan KUAPBD, PPAS, RAPBD dan APBD.

Tantangan pengawasan tahun 2023 sesuai dengan perencanaan strategis Inspektorat Provinsi, lebih dititik beratkan pada pelaksanaan *quality assurance* dan *consultancy*, yaitu pengawasan yang memposisikan sebagai mitra kerja, dengan tujuan untuk peningkatan capaian kinerja Inspektorat sesuai dengan visi dan misinyamasing-masing. Disamping itu proses kegiatan mengenai pemberantasan korupsi masih terus menjadi agenda penting bagi APIP karena dalam Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Isu peningkatan pengawasan dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean goverment* lebih diintensifkan lagi dengan menekankan pada percepatan penyelesaian penyusunan LHP tepat waktu sesuai jadwal waktu pemeriksaan yang disusun pada perencanaan program pemeriksaan sebelumnya. Proses pemeriksaan dan penyusunan LHP yang tepat waktu akan memudahkan pimpinan dalam mengambil langkah-langkah strategis sehubungan dengan rekomendasi/saran yang disampaikan oleh tim pemeriksa sehingga kebijakan yang diambil pimpinan tersebut masih *up to date* dan bobot saranyang disampaikan



mempunyai nilai yang tinggi dalam memberikan masukan pada kepala daerah sehubungan dengan perbaikan kinerja pemerintahan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Renja Inspektorat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renca Kerja Pemerintah Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023;
20. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.

Tujuan disusunnya Renja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Tahun 2022 adalah:

- (1) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun serta capaian visi dan misi selama 5 (lima) tahun sesuai yang termaktub dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat





Tahun 2018-2023;

- (2) Merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang, yaitu tahun 2023;
- (3) Memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- (4) Memudahkan penyusunan LAKIP SKPD dan dokumen laporan lainnya;
- (5) Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan SKPD; dan
- (6) Sebagai acuan resmi untuk pengukuran kinerja Inspektorat Provinsi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan



6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat telaahan rumusan tujuan dalam Renja Perangkat Daerah dan sasaran-sasaran berdasarkan rumusan tujuan tersebut berdasarkan isu-isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan berserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Inspektorat**

#### **A. Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023**

Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tahun 2018-2023 terdapat 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>
Meningkatnya Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja	Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja (Nilai)
Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal (Nilai)
Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu area penguatan pengawasan internal	Level Kapabilitas APIP (Level)
	Level Maturitas SPIP (Level)
	Nilai Persepsi Korupsi (Nilai)

Uraian hasil evaluasi capaian kinerja tersaji dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :



**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat (Renstra Perubahan)**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)			100%	87%			87%	
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan			156	136	87%		136	87%
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Audit Kinerja Pemda			111	91	82%		91	82%
	Laporan Pengawasan Kinerja	111	111	50	30	60%	110	30	60%
	Laporan Telaah Sejawat APIP se-Kalbar	0	0	0	0	0%	15	0	0%
	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	14	14	14	14	100%	14	14	100%
	Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	18	18	47	47	100%	45 PD	47	100%
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Audit Keuangan Pemda			26	32	123%		32	123%
	Laporan Evaluasi Dana Desa	4	4	12	7	58%	7	7	58%
	Laporan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	14	14	14	25	179%	24	25	179%



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Sub Kegiatan</b> <i>Reviu Laporan Kinerja</i>	<b>Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>		<b>2</b>	<b>100%</b>
	Laporan Reviu Laporan Kinerja Tahunan Pemprov Kalbar			1	1	100%	1	1	100%
	Laporan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			1	1	100%	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan</b> <i>Reviu Laporan Keuangan</i>	<b>Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>
	Laporan Reviu RKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
	Laporan Reviu RKA	1	1	1	1	100%	1	1	100%
	Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1	1	1	1	100%	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan</b> <i>Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota			14	8	57%	11	8	57%
<b>Sub Kegiatan</b> <i>Kerja sama Pengawasan Internal</i>	Laporan BA Hasil Kerja sama Pengawasan Internal			0	0	0%	2 Kesepakatan	0	0%
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</b>			<b>91%</b>	<b>57%</b>			<b>57%</b>	
<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK</b>			<b>91%</b>	<b>57%</b>			<b>57%</b>	
<b>Sub Kegiatan</b> <i>Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI</i>	<b>Tersedianya Laporan Hasil Kerjasama Pengawasan Internal</b>			<b>8</b>	<b>5</b>	<b>63%</b>		<b>5</b>	<b>63%</b>



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	4	4	4	4	100%	2	4	100%
	BA hasil Rapat Gelar Pengawasan dan Pemuktahiran Data TLHP	4	4	4	1	25%	1 BA	1	25%
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus</b>			<b>92%</b>	<b>151%</b>			<b>151%</b>	
<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu</b>			<b>66</b>	<b>108</b>	<b>164%</b>		<b>108</b>	<b>164%</b>
<b>Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</b>	Berita Acara Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	14	14	10	10	100%	1	10	100%
<b>Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu</b>			<b>56</b>	<b>98</b>	<b>175%</b>		<b>98</b>	<b>175%</b>
	Laporan PDTT	10	10	12	25	208%	12	25	208%
	Laporan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	3	0	7	7	100%	-	7	100%
	Laporan WASDALPEG	12	12	7	4	57%	-	4	57%
	Laporan Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNPB	4	0	0	0	0%	-	0	0%
	Laporan Probit Audit			5	14	280%	8	14	280%
Laporan Pemeriksaan Serentak Aset			1	1	100%	4	1	100%	



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang & Jasa	4	0	4	4	100%	4	4	100%
	Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1	1	4	35	875%	4	35	875%
	Laporan Reviu Standar Satuan Harga (SSH), ASB, dan HSPK			0	0	0%	3	0	0%
	Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	6	0	0	0	0%	-	0	0%
	Laporan Evaluasi Pelayanan Publik	14	0	0	0	0%	-	0	0%
	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai Provinsi Kalimantan Barat			4	1	25%	-	1	25%
	Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blower System	4	4	8	3	38%	5	3	38%
	Laporan Monev (LAPOR!-SP4N)	4	4	4	4	100%	4	4	100%
	Laporan Asistensi Pengawasan Percepatan Berusaha Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah			0	0	0%	-	0	0%
	Laporan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD			0	0	0%	4	0	0%
<b>Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan</b>			<b>100%</b>	<b>107%</b>			<b>107%</b>	



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Tersedianya Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan</b>			17	17	100%		17	100%
<b>Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan</b>	<b>Tersedianya Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan</b>			4	4	100%		4	100%
	Pedoman/Standar Pengawasan Internal	3	3	3	3	100%	3	3	100%
	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1	1	1	1	100%	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Tersedianya Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>			13	13	100%		13	100%
	Rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah	0	0	1	1	100%	1	1	100%
	Laporan Klinik Layanan Informasi Pengawasan	2	2	12	12	100%	12	12	100%
<b>Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan</b>			100%	107%			107%	
<b>Sub Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda</b>			159	84	53%		84	53%
	Laporan Asistensi Penilaian Angka Kredit Fungsional			80	80	100%	2 PAK	80	100%





**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Laporan Pendampingan Pemeriksaan Pengawasan Ekstern	1	1	1	1	100%	1	1	100%
	Laporan Asistensi Penanganan Benturan Kepentingan	45 PD	PD	1	1	100%	1	1	100%
	Laporan Asistensi Penilaian Risiko Perangkat Daerah			47	1	2%	45	1	2%
	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	25	0	30	1	3%	45	1	3%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	1	2	92	4600%	90 PD	92	4600%
<b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	<b>Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>50%</b>		<b>3</b>	<b>50%</b>
	Laporan Asistensi dan Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	2	2	4	1	25%	4	1	25%
	Laporan Pendampingan Aksi Pencegahan Korupsi	5	5	2	2	100%	1	2	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	<b>Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas</b>			<b>30</b>	<b>32</b>	<b>107%</b>		<b>32</b>	<b>107%</b>
	Laporan Pendampingan Sapu Bersih Pungutan Liar	14	14	15	17	113%	-	17	113%



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Laporan Survei Penilaian Integritas	1	0	1	1	100%	-	1	100%
	Laporan Pendampingan Penanganan Pelaporan Gratifikasi	2	2	2	2	100%	45	2	100%
	Laporan Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	1	1	1	1	100%	45	1	100%
	Laporan Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)			1	1	100%	45	1	100%
	Laporan Asistensi Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	3	3	10	10	100%	6	10	100%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu dan sesuai ketentuan</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	
<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>		<b>32</b>	<b>100%</b>
<b>Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	-	-	1	1	100%	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</b>	Laporan Koordinasi Penyusunan RKA - SKPD	-	-	1	1	100%	1	1	100%



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD Perubahan	-	-	1	1	100%	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi Dan Penyusunan DPA- SKPD	Laporan Koordinasi DPA - SKPD	-	-	1	1	100%	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Laporan Koordinasi Perubahan DPA - SKPD	-	-	5	5	100%	1	5	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Laporan Capaian Kinerja</b>	-	-	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>
	Dokumen Monev Capaian Kinerja & Reward Kinerja Fungsional	-	-	5	5	100%	5	5	100%
	Laporan Pemilihan Auditor, P2UPD teladan	-	-	6	6	100%	-	6	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>
	Dokumen Penetapan Kinerja	-	-	1	1	100%	1	1	100%
	Dokumen Standar Operasional Prosedur	-	-	3	3	100%	3	3	100%
	Laporan Kinerja Tahunan (LKT)	-	-	1	1	100%	1	1	100%
	Laporan LPPD dan LKPJ	-	-	2	2	100%	2	2	100%
	Laporan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	-	-	4	4	100%	4	4	100%
	Dokumen Analisis Jabatan	-	-	1	1	100%	1	1	100%



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP</b>	-	-	100%	96%			96%	
<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	50	48	96%		48	96%
<b>Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Laporan pembayaran gaji PNS	-	-	12	12	100%	120 Orang	12	100%
<b>Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	Laporan Penyediaan materai dan transaksi keuangan	-	-	12	12	100%	1	12	100%
<b>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	Laporan Verifikasi Keuangan	-	-	12	12	100%	1	12	100%
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	1	1	100%	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan : Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	2	0	0%	2	0	0%
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</b>	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran	-	-	11	11	100%	11	11	100%
<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Presentase Penatausahaan Aset yang Sesuai Ketentuan</b>	-	-	100%	100%			100%	
<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersediannya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	-	-	18	18	100%		18	100%



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen RKBU dan RKPBU	-	-	1	1	100%	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa asuransi gedung dan kendaraan	-	-	9	9	100%	10	9	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan pembinaan dan pengawasan Barang Milik Daerah	-	-	4	4	100%	4	4	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	BA Rekonsiliasi Barang dan Laporan barang Milik Daerah	-	-	4	4	100%	2	4	100%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>86%</b>			<b>86%</b>	
<b>Kegiatan</b> : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Jumlah Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	-	-	<b>7</b>					
<b>Sub Kegiatan</b> : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja serta perlengkapannya sesuai dengan ketentuan	-	-	136	136	100%	-	136	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengolahan Data Administrasi Kepegawaian	-	-	12	12	100%	12	12	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	12	12	100%	1	12	100%



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Sub Kegiatan</b> : Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	2	2	100%	2	2	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Kegiatan pemulangan Pegawai yang pensiun	-	-	5	5	100%	1	5	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang dilatih berdasarkan Tupoksi	-	-	123	123	100%	80	123	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensinya melalui Bimbingan teknis	-	-	215	215	100%	117	215	100%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Presentase Nilai Kepuasan Layanan Internal</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>96%</b>			<b>96%</b>	
<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Umum</b>	-	-	<b>10</b>					
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan penyediaan komponen listrik	-	-	12	12	100%	1	12	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	12	12	100%	3	12	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	12	12	100%	6	12	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makan minum rapat yang tersedia	-	-	5000	5000	100%	2000 Paket	5000	100%



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	12	12	100%	3	12	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan	-	-	12	12	100%	48	12	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	12	12	100%	1	12	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi setahun	-	-	12	12	100%	1	12	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata	-	-	200	118	59%	118	118	59%
<b>Sub Kegiatan</b> : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	-	-	12	12	100%	1	12	100%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	
<b>Kegiatan</b> : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah yang berkualitas dan sesuai kebutuhan</b>	-	-	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>100%</b>		<b>162</b>	<b>100%</b>
<b>Sub Kegiatan</b> : Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel	-	-	105	105	100%	105 Paket	105	100%
<b>Sub Kegiatan</b> : Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin	-	-	57	57	100%	10 Unit	57	100%



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah</b>	-	-	100%	100%			100%	
<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	36	36	100%		36	100%
<b>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Laporan Hasil Penyediaan Surat Menyurat	-	-	12	12	100%	1	12	100%
<b>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</b>	Laporan Pembayaran Tagihan Listrik dan Air	-	-	12	12	100%	12	12	100%
<b>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Laporan Hasil Penyediaan Jasa Kebersihan dan Tenaga Pendukung Kantor	-	-	12	12	100%	13	12	100%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Presentase terpeliharanya barang milik daerah untuk untuk menunjang kerja perangkat daerah</b>	-	-	100%	61%			61%	
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	359	220	61%		220	61%
<b>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Jumlah Mobil dinas Jabatan yang diperlihara	-	-	1	1	100%	1 Unit	1	100%





**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Renstra 2020	Realisasi Target Kinerja 2020	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2022	
				Target	Capaian	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Mobil dan Motor Dinas Operasional yang dipelihara	-	-	15	15	100%	15 Unit	15	100%
<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair yang dipelihara	-	-	154	16	10%	4 Unit	16	10%
<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	-	-	181	181	100%	188 Unit	181	100%
<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	-	-	2	2	100%	5 Unit	2	100%
<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	-	-	1	1	100%	2 Unit	1	100%
<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang/gedung Kantor yang dipelihara	-	-	5	4	80%	1 Unit	4	80%



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat**

### Interpretasi capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja:

Ukuran ketercapaian sasaran pertama, yaitu meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja, tercermin dari realisasi yang sesuai dengan target nilai yang ditetapkan pada indikator Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja. Dalam mendukung pencapaian target indikator yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu 15,50 pada tahun 2021, Inspektorat Prov. Kalbar telah menyusun program, kegiatan, subkegiatan, hingga aktivitas di dalam subkegiatan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Internal yang ada pada Program Penyelenggaraan Pengawasan. Pada tahun 2021, capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah 98%. Hal ini dapat dinilai telah tercapai dengan baik mengingat adanya beberapa kegiatan yang mengalami pemotongan anggaran sehingga turut berdampak pada kurang maksimalnya realisasi kinerja. Selain itu, pemotongan anggaran yang dilakukan juga tidak diikuti dengan revisi target kinerja, sehingga beberapa kegiatan menunjukkan persentase realisasi yang kecil.

Setiap tahunnya, Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja diperoleh dari hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Provinsi Kalimantan Barat oleh Kementerian PAN-RB. Untuk hasil evaluasi tahun 2021, telah dirilis bahwa capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Provinsi Kalimantan Barat adalah 15,38. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan meskipun upaya yang dilakukan Inspektorat telah mencapai 98%. Hal ini disebabkan oleh komponen penilaian SAKIP Pengukuran Kinerja tidak hanya ditentukan dari upaya Inspektorat sendiri, melainkan juga Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

### Interpretasi capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal:

Ketercapaian sasaran kedua, yaitu meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal, tercermin dari terealisasinya target nilai yang ditetapkan pada indikator RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu 7,62. Untuk itu, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat melakukan upaya untuk mendukung tercapainya target yang ditetapkan RPJMD melalui Program Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah. Hingga akhir tahun 2021, realisasi kinerja mencapai 94%. Beberapa kegiatan tidak tercapai sesuai target dan bahkan tidak dilakukan sama sekali karena ketersediaan anggaran yang terbatas. Kegiatan tersebut antara lain pemeliharaan mebel (10,4%) dan gedung kantor (80%) serta penyusunan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang diputuskan untuk tidak dilakukan pada tahun 2021.

Setiap tahunnya, Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal diperoleh dari hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Provinsi Kalimantan Barat oleh Kementerian PAN-RB. Untuk hasil evaluasi tahun 2021, telah dirilis bahwa nilai capaian SAKIP Komponen Evaluasi Internal Provinsi Kalimantan Barat adalah 6,76. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan meskipun upaya yang dilakukan Inspektorat telah mencapai 94%. Hal ini disebabkan oleh komponen penilaian SAKIP Evaluasi Internal tidak hanya ditentukan dari upaya Inspektorat sendiri, melainkan juga Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

#### Interpretasi capaian Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP:

Peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah ditargetkan berada pada level 3 untuk tahun 2021. Dengan mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif melalui peningkatan kompetensi APIP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan salah satu langkah dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Level 3 (*Integrated*) untuk kapabilitas APIP menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar. Outcome yang dihasilkan adalah APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Pada tahun 2021, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upaya untuk mencapai target kapabilitas APIP level 3 melalui pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah. Seluruh upaya tersebut telah terealisasi 100% meskipun terjadi *refocusing* anggaran melalui pemanfaatan seminar dan *workshop* berbasis *online*.

Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat



terakhir kali dilakukan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda sehingga penilaian hingga saat ini belum diperbaharui dan sebelum tahun 2021, penilaian dilaksanakan dua tahun sekali. Oleh karena itu, nilai yang digunakan pada tahun 2021 adalah hasil penilaian pada tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu Level 3 (tiga).

Interpretasi capaian Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP:

Pengendalian internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, setiap tahunnya perlu dilakukan penilaian atas kematangan sistem pengendalian internal atau yang disebut dengan level maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penilaian tersebut mencakup tiga komponen, yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas level maturitas SPIP diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPKP.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upaya untuk mencapai target level 3 maturitas SPIP melalui pelaksanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan persentase ketercapaian 100%. Hasil yang diperoleh pada tahun 2021 melalui penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada level 2,8. Capaian ini masih di bawah target, meskipun upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah maksimal. Hal ini disebabkan oleh komponen penilaian dari level maturitas SPIP tidak hanya ditentukan dari upaya Inspektorat sendiri, melainkan juga Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Interpretasi Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Persepsi Korupsi:

Nilai Persepsi Korupsi atau yang saat ini disebut Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tingkat Pemerintah Provinsi setiap tahunnya. Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator Nilai Persepsi Korupsi di RPJMD, yaitu 6,40 pada tahun 2021, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upaya melalui aktivitas, subkegiatan, dan



kegiatan yang ada pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi. Pada tahun 2021, capaian program dan kegiatan yang mendukung indikator Nilai Persepsi Korupsi adalah 100%.

Pada tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan hasil evaluasi Nilai Persepsi Korupsi yang saat ini disebut IPAK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 80,68 dalam skala 0-100. Apabila dikonversi ke skala 7 (tujuh) sebagaimana target di RPJMD, maka nilai tersebut menjadi 5,65. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan meskipun upaya yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah maksimal. Hal ini disebabkan oleh komponen penilaian dari Nilai Persepsi Korupsi atau IPAK tidak hanya ditentukan dari upaya Inspektorat sendiri, melainkan juga Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Capaian seluruh IKU dari awal tahun pelaksanaan RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Kalbar

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET 2021	REALISASI			Nilai Capaian 2021 (%)
					2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	15,5	14,44	15,07	15,38	98
		Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal (Nilai)	7,62	6,62	6,76	6,76	94
		Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu area penguatan pengawasan internal	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	3	3	100
			Level Maturitas SPIP (Level)	3	3	3	2,8	100
			Nilai Persepsi Korupsi (Nilai)	6,40	6,17	6,62	5,65	100

Interpretasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat:

1. Jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang bersertifikasi sampai dengan 2021 sebanyak 73 orang atau 93% dari total 78 orang. Pencapaian realisasi yang belum mencapai target dikarenakan masih ada pegawai yang belum mengikuti diklat sertifikasi sehingga belum diangkat menjadi fungsional. Tingginya persentase fungsional bersertifikat menunjukkan kesungguhan Inspektorat dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawas



yang kompeten di bidangnya.

2. Jumlah Fungsional Auditor yang menyampaikan DUPAK hingga akhir tahun 2021 sebanyak 26 orang dari total 40 orang. Sementara itu, P2UPD yang telah menyampaikan DUPAK sebanyak 31 orang dari total 33 orang. Masih kurangnya pencapaian ini dikarenakan tingginya rasio beban kerja fungsional Auditor dan P2UPD sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian DUPAK.
3. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat pada tahun 2021 adalah 14 orang dari total 117 pegawai (12%). Masih rendahnya pencapaian tersebut disebabkan jumlah anggaran yang tersedia sangat terbatas ditambah *refocusing* anggaran yang dilakukan guna penanganan percepatan pemulihan Covid-19. Sehingga dana yang tersedia untuk kegiatan peningkatan SDM lebih kecil, jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada.
4. Rata-rata jumlah pegawai/auditor yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek, dan lain-lain sampai dengan tahun 2019 sebesar 116%. Pencapaian realisasi sudah melebihi target. Sementara itu, akibat adanya *refocusing* anggaran tahun 2020, pelaksanaan bimtek, sosialisasi, dan sejenisnya tidak dilaksanakan. Akan tetapi, pada tahun 2021, meskipun terkendala pendanaan, realisasi kegiatan ini dapat mencapai 100% dengan memanfaatkan seminar, sosialisasi, bimtek maupun *workshop* berbasis *online*.
5. Capaian pada Jumlah objek periksa sampai dengan 2019 sebesar 100% dengan total 146 objek periksa. Pencapaian realisasi sudah mencapai target. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah objek sebesar 29% dari tahun sebelumnya menjadi 103 objek periksa. Untuk tahun 2021, jumlah objek periksa untuk pemeriksaan reguler direncanakan mencapai 100 objek. Akan tetapi, hanya terealisasi 30% karena *refocusing* anggaran yang dilakukan.
6. Capaian pada Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sampai dengan 2019 sebesar 100% dengan 146 objek periksa. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan objek sebesar 29% dari tahun sebelumnya menjadi 103 objek periksa. Untuk tahun 2021, jumlah objek periksa untuk pemeriksaan reguler direncanakan mencapai 100 objek. Akan tetapi, hanya terealisasi 30% karena *refocusing* anggaran yang dilakukan.
7. Capaian Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahunan Daerah dan Penyusunan PKPT Provinsi sampai dengan tahun 2021 mencapai 100% meskipun pada tahun tersebut tidak dianggarkan pelaksanaannya. Akan tetapi,



dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, Pencapaian telah sesuai dengan target yang dilaksanakan satu kali.

8. Pengaduan Masyarakat sampai dengan tahun 2021 melalui aplikasi SP4N LAPOR! adalah 64 pengaduan dan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Pencapaian realisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat sangat tergantung pada pengaduan yang masuk serta kriteria pengaduan dan bukti yang ada.
9. Persentase capaian Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sampai dengan tahun 2021 adalah 100%. Pelaksanaan reviu LKPD hanya dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu setelah LKPD selesai disusun dan sebelum diserahkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
10. Jumlah SKPD yang di Evaluasi terkait SAKIP terus meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2021, tercatat 47 perangkat daerah yang telah dievaluasi dan hasilnya rata-rata BB (sangat baik). Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam implementasi akuntabilitas kinerja.
11. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rata-rata capaian pada Laporan Hasil Reviu RKA sampai dengan tahun 2021 adalah 100%.
12. Capaian pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sampai dengan tahun 2021 mencapai 100% dengan 14 Kab/Kota sebagai objek evaluasi.
13. Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan (PAMJAB) telah sesuai dengan kondisi akhir masa jabatan kepala daerah, yaitu sebanyak 3 Kab/Kota pada tahun 2019 dan 2020, serta 7 Kab/Kota pada tahun 2021.
14. Rata-rata capaian pada kegiatan Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 mencapai 100% dengan kategori baik. Akan tetapi, pada tahun 2021, setelah dikeluarkannya Permendagri 90 Tahun 2019, kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan.
15. Rata-rata persentase temuan yang telah selesai ditindaklanjuti (Inspektorat Provinsi, Kab/Kota, PDDT) sebesar 91% dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dan pada tahun 2021 mencapai 91,4%.
16. Rata-rata persentase temuan yang telah selesai ditindak lanjuti (BPK RI) dari tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar 91,25%. Sementara pada akhir tahun 2021, persentase penyelesaian mencapai 87,02%. Rata-rata capaian



kurang dari 100% disebabkan masih banyaknya temuan lama terkait keuangan dan aset yang melibatkan pihak ke tiga sehingga sulit diselesaikan.

17. Pelaksanaan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 masih belum mencapai 100%, juga pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini terjadi karena Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai penyelenggara tidak siap akibat adanya pengurangan anggaran pada kegiatan tersebut. Hingga pada tahun 2021, Kegiatan Larwas dapat dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
18. Rata-rata capaian Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kemendagri dari tahun 2014 sampai dengan 2020 mencapai 100%. Pada tahun 2021, yang selesai baru 23,07% dan sisanya 76,93% masih dalam proses penyelesaian.
19. Persentase Jumlah SKPD yang melaksanakan PMP-RB hingga tahun 2021 adalah 100% dengan objek penilaian sebanyak 47 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penilaian, terdapat sebelas perangkat daerah yang memperoleh kategori A (sangat baik). Hal tersebut mendorong peningkatan indeks RB Pemprov Kalbar sehingga memperoleh nilai 73,90 dengan kategori BB (Baik).
20. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN dimulai pada tahun 2016, yaitu menghitung realisasi wajib lapor LHKASN yang sudah diverifikasi dengan target jumlah wajib lapor LHKASN pada tahun dimaksud. Rata-rata capaian Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN pada tahun 2020 sampai tahun 2021 adalah 100%.
21. Fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi oleh Inspektorat dengan melakukan penilaian terhadap OPD dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yang dimulai pada tahun 2016 sampai dengan 2021 mencapai 100%.
22. Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi dilakukan setiap satu kali dalam satu tahun. Capaian pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah 100%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan tersaji pada Tabel 2.3 sebagai berikut:





Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	<b>Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja</b>	<b>15.00</b>	<b>15.50</b>	<b>16.00</b>	<b>16.50</b>	<b>15.07</b>	<b>15.38</b>	<b>16.00</b>	<b>16.50</b>	
	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100%	100%	80%	80%			80%	80%	Indikator Sesuai Kepmendagri 050-5889
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	90%	91%	92%	95%		57%			
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	90%	92%	92%	95%		151%			
2.	<b>Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal</b>	<b>7.32</b>	<b>7.62</b>	<b>8.32</b>	<b>8.62</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>	<b>8.32</b>	<b>8.62</b>	
	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100%	100%	80%	80%			80%	80%	Indikator Sesuai Kepmendagri 050-5889
	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	100%	100%	80%	80%			80%	80%	Indikator Sesuai Kepmendagri 050-5889
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	80%	80%			80%	80%	Indikator Sesuai Kepmendagri 050-5889
	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100%	100%	80%	80%		96%			
	Persentase pelayanan administrasi Umum sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%		96%			
	Presentase Penatausahaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%		100%			
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%		100%			
	Presentase Nilai Kepuasan Layanan Internal	100%	100%	100%	100%		96%			



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2022**

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100%	100%	100%	100%		100%			
	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%		100%			
	Persentase terpeliharanya barang milik daerah untuk menunjang kerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%		61%			
<b>3.</b>	<b>Level maturitas SPIP</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 4</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 4</b>	
	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	100%	100%	80%	80%			80%	80%	Indikator Sesuai Kepmendagri 050-5889
	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	100%	100%	100%	100%		100%			
<b>4.</b>	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 4</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 3</b>	<b>Level 4</b>	
	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	-	-	80%	80%			80%	80%	Indikator Sesuai Kepmendagri 050-5889
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%		100%			
<b>5.</b>	<b>Nilai Persepsi Korupsi</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>6,62</b>	<b>5,65</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	
	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	100%	100%	80%	80%			80%	80%	Indikator Sesuai Kepmendagri 050-5889
	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	100%	100%	100%	100%		107%			



Pada tahun 2021, Inspektorat melakukan penyederhanaan dan penyempurnaan sasaran strategis yang telah ada sebelumnya. Hal ini menyebabkan adanya beberapa sasaran yang telah direncanakan tahun sebelumnya, menjadi disederhanakan pada tahun 2021. Sasaran yang telah disederhanakan terfokus pada upaya-upaya untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas reviu dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan lainnya.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Inspektorat melakukan revisi Renstra dan menyesuaikan dengan beberapa perubahan yang terjadi, diantaranya perubahan struktur organisasi dan tata kelola menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 148 Tahun 2021, perubahan terkait kegiatan dan subkegiatan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Momentum perubahan renstra kemudian dimanfaatkan untuk menyederhanakan indikator program, menambahkan indikator sasaran program, dan merevisi target program dan kegiatan jangka menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Perubahan-perubahan yang dilakukan tetap selama tidak merubah Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis yang ada pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023.

Sasaran Strategis Inspektorat dirincikan ke dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan kualitas pelayanan suatu perangkat daerah. Kelima IKU yang diampu oleh Inspektorat setiap tahunnya diperoleh dari hasil evaluasi Kemenpan RB dan BPKP. Akan tetapi, Inspektorat tetap melakukan upaya untuk mencapai target IKU yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun.

Keberhasilan pencapaian IKU dapat dilihat dari persentase realisasi capaian target kinerja pelayanan yang telah ditetapkan dalam Renstra terhadap masing-masing IKU. Pada Tabel 2.2, dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja masing-masing IKU. Oleh karena realisasi atas target IKU tahun 2021 masih menunggu evaluasi dari Kemenpan RB dan BPKP dirilis, pencapaian atas IKU kemudian dilakukan dengan menghitung pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan Inspektorat.

Secara keseluruhan, pencapaian IKU dapat dikategorikan berhasil karena persentase ketercapaian di atas 90%, bahkan beberapa telah mencapai 100%.



Kurang maksimalnya pencapaian disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah *refocusing* anggaran yang dilakukan sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal sebagaimana yang telah direncanakan. Bahkan, ada beberapa kegiatan yang diputuskan untuk tidak dilaksanakan pada tahun 2021. Selanjutnya, akan direviu dan dievaluasi kembali program dan kegiatan yang sebelumnya untuk perencanaan di tahun selanjutnya.

Untuk proyeksi ke depannya, yaitu pada tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023, diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang setiap tahunnya selalu ditargetkan untuk mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terus dilakukan agar Inspektorat selalu berupaya memberikan pelayanan yang semakin baik setiap tahunnya.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat**

Upaya Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan dan pembinaan SKPD di Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan efektif. Hal ini dilakukan dengan pemberian Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan kepada SKPD dan juga memberikan sosialisasi-sosialisasi sebagai upaya preventif terhadap SKPD untuk tidak melakukan penyelewengan dan kesalahan dalam kinerjanya. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan dan pembinaan di SKPD Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upayanya sebaik mungkin agar tidak terjadi penyelewengan dan kesalahan di SKPD sehingga terwujudlah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik di Provinsi Kalimantan Barat.

Pemberian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi telah dilakukan dengan terbuka melalui *website* Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, yaitu *inspektorat.kalbarprov.go.id* yang mencantumkan kegiatan-kegiatan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan berkaitan dengan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Namun, untuk hal yang sifatnya detail temuan, rekomendasi pemeriksaan, atau kasus-kasus yang sedang ditangani, tidak dapat diungkapkan karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan pemahaman oleh masyarakat. Informasi yang saat ini tersedia pada *website* diperkirakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang berkaitan dengan rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan



fungsi apabila ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

**1) Terbatasnya sumber daya yang tersedia**

Sumber daya merupakan modal awal dalam setiap aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumber daya dapat berupa personil (SDM), sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya keuangan berupa anggaran belanja. Dari segi kuantitas, rasio jumlah aparatur pengawas dengan jumlah objek pengawasan saat ini telah memenuhi. Namun, tetap diperlukan pengelolaan dan perencanaan yang baik dalam pengalokasian aparatur pengawas dalam setiap penugasan. Sementara itu, dari segi kualitas, aparatur pengawas yang dimiliki masih belum memenuhi jika ditinjau dari perbandingan antara latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan teknis di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kompleksitas tugas yang harus dilaksanakan, sehingga harus disusun tim yang solid, saling melengkapi dan dapat bekerja sama dengan baik. Selain itu, peningkatan kualitas SDM melalui dukungan pelatihan dan bimbingan juga diperlukan.

Terbatasnya kemampuan daerah mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga harus ada pengaturan yang baik dalam pemanfaatannya. Begitu pula dengan pengalokasian anggaran, harus benar-benar disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas sebagaimana visi dan misi daerah, serta yang menjadi prioritas nasional. Pemasalahan yang sering terjadi adalah program/kegiatan yang menjadi prioritas nasional yang seharusnya menjadi beban anggaran pemerintah pusat menjadi beban pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keterbatasan anggaran bukan hanya terjadi di daerah, namun juga terjadi di tingkat nasional.

**2) Pedoman/standar pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya ditetapkan**

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bagi Inspektorat Daerah Provinsi untuk melakukan perubahan paradigma pengawasan. Jika sebelumnya pemeriksaan lebih kepada *compliance audit* (audit kepatuhan), sekarang beralih fokus menjadi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu meski belum ada penetapan petunjuk pelaksanaan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.



Instruksi pelaksanaan hanya dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan setiap tahun. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan pemeriksaan dan akan mempersulit dalam melakukan evaluasi kinerja karena mekanisme pelaksanaannya belum terstandarisasi.

Begitu pula untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, bahwa pelaksanaan pengawasan kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang seharusnya ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun, hingga saat ini belum juga ditetapkan, sehingga pelaksanaan tugas tersebut menjadi beban tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini akan mempersulit Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan kedepan.

### **3) APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki akses pada sistem informasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa sistem informasi, seperti keuangan, barang, dan kepegawaian, namun Inspektorat belum memiliki akses kepada sistem informasi tersebut. Pentingnya akses diberikan kepada APIP Inspektorat adalah terkait dengan pemetaan sasaran dan fokus pengawasan yang akan dilakukan, yang dalam tahap perencanaan pengawasan perlu adanya identifikasi atau tahap pemahaman objek pengawasan. Hal tersebut berguna untuk lebih mengefisienkan waktu pelaksanaan yang berdampak pada pembiayaan pelaksanaan kegiatan, serta lebih mengefektifkan penyusunan langkah kerja agar dapat lebih terarah kepada pemilik dengan potensi risiko yang tinggi.

### **4) Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Inspektorat Prov. Kalbar**

*The Institutes of Internal Auditors (IA)*, mengeluarkan pernyataan terkait peran termutakhir internal audit: "Internal audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah



pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.” Peran mutakhir internal audit tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran mutakhir internal audit di atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inspektorat selaku APIP sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat.

Dalam rangka menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan Inspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
2. Komitmen Gubernur Kalimantan Barat dalam mendukung peran Inspektorat dan dorongan supaya Inspektorat tidak *“doing business as usual”* atau bertahan dalam zona nyaman, Inspektorat harus bisa berinovasi untuk meningkatkan kemampuan dan perannya;
3. Adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi.

Sebagai gambaran, berikut Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Prov. Kalbar, yang digambarkan pada Tabel 2.4:



Tabel 2. 3 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja			Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja	13,72	14.44	15.00	15.50	15.50	16.50	16.50		
				Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pemda	-	80	80	80	80	80	80		
			6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100	100	100	100	-	-	-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89	90	91	-	-	-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89	90	92	-	-	-		





**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-	-	-	-	80	80	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan	318	318	318	318	-	-	-	IRBAN IV	
			6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan	-	-	-	-	80	80	80	IRBAN IV	
			6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	225	225	225	225	-	-	-	Sekretaris, Irbn I-IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	-	110	110	220	Sekretaris, Irbn I-IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	26	26	26	-	-	-	Irbn III, Irbn IV	Pemprov Kalbar



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	-	-	-	2	2	4	Irban V	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	14	14	14	14	-	-	-	Sekretaris, Irban I-IV	Kab/Kota
			6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	-	-	-	-	11	11	22	Sekretaris, Irban I-IV	Kab/Kota
			6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Tersedianya Mou Kerjasama Pengawasan Internal	2	2	2	2	-	-	-	Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	-	-	-	2	2	4	Subag ADUM	Pemprov Kalbar
		<b>Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Penilaian Internal</b>			<b>Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal</b>	<b>6,32</b>	<b>6,62</b>	<b>7,32</b>	<b>7,62</b>	<b>8,32</b>	<b>8,62</b>	<b>8,62</b>		
				<b>Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDDT</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemda</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100	100	100	100	-	-	-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89	90	91	-	-	-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89	90	92	-	-	-		
			6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-	-	-	-	80	80	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan	318	318	318	318	-	-	-	IRBAN IV	
			6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan	-	-	-	-	80	80	80	IRBAN IV	



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	26	26	26	-	-	-	Urban III, Urban IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	31	31	62	Urban III, Urban IV	Pemprov Kalbar	
			6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Reviu Laporan Keuangan	3	3	3	3	-	-	Urban I, Urban III	Pemprov Kalbar	
			6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	-	-	3	3	6	Urban I, Urban III	Pemprov Kalbar	
					<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>			
			6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	<b>Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</b>	100	100	100	100	-	-	-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89	90	91	-	-	-		



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89	90	92	-	-	-		
			6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-	-	-	-	80	80	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu	124	124	124	124	-	-	-	IRBAN V	
			6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-	80	80	80	IRBAN V	
			6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Berita Acara Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10 BA	10 BA	10 BA	10 BA	-	-	-	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris	Pemprov Kalbar



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	114	114	114	114	-	-	-	Urban V	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-	54	54	108	Urban V	Pemprov Kalbar
				Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		80	80	80	80	80	80		
			6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100	100	100	100	-	-	-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89	90	91	-	-	-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89	90	92	-	-	-		



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-	-	-	-	80	80	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan	318	318	318	318	-	-	-	IRBAN IV	
			6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan	-	-	-	-	80	80	80	IRBAN IV	
			6.01.02.1.01.07	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	8	8	8	8	-	-	-	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.07	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	-	-	3	3	6	Sekretaris	Pemprov Kalbar



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	0	100	100	100	-	-	-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	0	100	100	100	-	-	-		
			06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan	0	-	-	-	80	80	80		
			6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	3	4	5	6	-	-	-	Irban 1	
			6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan	-	-	-	-	80	80	80	Irban 1	
			6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	3	4	5	6	-	-	-	Subag PKA	Pontianak





**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	4	4	8	Sekretaris	Pontianak
			6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Pengawasan	13	13	13	13	-	-	-	Subag PKA	Pontianak
			6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	13	13	26	Sekretaris	Pontianak
			6.01.03.1.02	Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	162	162	162	162	-	-	-	Irban II	
			6.01.03.1.02	Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	-	-	-	80	80	80	Irban II	
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda	129	129	129	129	-	-	-	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	92	92	184	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pelayanan administrasi Umum sesuai prosedur	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase Penatausahaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	100	100	100	100	-	-	-		



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
					Presentase Nilai Kepuasan Layanan Internal	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	-	-	12	12	-	-	-		
					Persentase terpeliharanya barang milik daerah untuk menunjang kerja perangkat daerah	-	-	100	100	-	-	-		
			6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	-	-	-	-	80	80	80		



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	22	22	22	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	
			6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	80	80	80	Sekretaris, Subag PKA		
			6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak	
			6.01.01.1.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	5	5	5	5	-	-	-	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	5	5	10	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	12	60	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18	18	18	18	-	-	-	Sekretaris	



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	80	80	80	Sekretaris	
			6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	120	120	240	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penunjang Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	2	2	2	2	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	2	2	4	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Teran Skpd	11	11	11	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak





**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	11	11	22	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	16	16	16	16	-	-	-	Sekretaris	
			6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	80	80	80	Sekretaris	
			6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	9	9	9	9	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	10	10	20	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah	4	4	4	4	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	4	4	8	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	2	2	2	2	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	2	2	4	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	-	-	-	Sekretaris	



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	80	80	80	Sekretaris	
			6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas buat ASN sesuai Ketentuan	136	136	136	136	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	0	0	0	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	12	12	24	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.04	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.05.04	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	2	2	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	4	4	8	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan/Pensiun	5	5	5	5	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-	-	1	3	4	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Sekretaris</b>	
			<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Administrasi Umum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>Sekretaris</b>	
			6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	3	3	6	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	6	6	12	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Makanan Dan Minuman Rapat Kantor	5000	5000	5000	5000	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	2000	2000	4000	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	3	3	6	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	48	48	96	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Dan Pelayanan Kunjungan Tamu	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Terselenggaranya Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	118	118	118	200	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	118	118	235	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	130	130	130	130	-	-	-	Sekretaris	



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	-	-	-	-	80	80	80	Sekretaris	
			6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	105	105	105	105	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	105	105	210	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak	
			6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	57	57	57	57	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	10	10	20	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak	
			6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3	3	-	-	-	Sekretaris	
			6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	80	80	80	Sekretaris	





**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	12	12	24	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	13	13	26	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris	
			6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	80	80	80	Sekretaris	
			6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	15	15	15	15	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	15	15	30	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak	
			6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	154	154	154	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak	
			6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	4	4	8	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak	
			6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	181	181	181	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak	
			6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	188	188	376	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak	



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	5	5	10	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	2	2	4	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5	5	5	5	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
		<b>Meningkatnya Penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu Area Penguatan Pengawasan</b>			<b>Level kapabilitas APIP</b>	<b>level 3</b>	<b>level 3</b>	<b>level 3</b>	<b>level 3</b>	<b>level 3</b>	<b>Level 4</b>	<b>Level 4</b>		
				<b>Meningkatnya Efektivitas Kapabilitas APIP Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapabilitas APIP</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pelayanan administrasi Umum sesuai prosedur	100	100	100	100	-	-	-		
					Presentase Penatausahaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	100	100	100	100	-	-	-		
					Presentase Nilai Kepuasan Layanan Internal	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100	100	100	100	-	-	-		



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
					Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	-	-	12	12	-	-	-		
					Presentase terpeliharanya barang milik daerah untuk menunjang kerja perangkat daerah	-	-	100	100	-	-	-		
			6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	-	-	-	-	80	80	80		
			6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	-	-	-	Sekretaris	
			6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	80	80	80	Sekretaris	
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	2	2	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	4	4	4	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	105	105	105	123	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	200	220	420	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	215	215	215	215	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	117	117	234	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
					Level Kapabilitas Maturitas SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 4	level 4		
				Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan SPIP	Persentase Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	80	80	80	80	80	80	80		
			06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	0	100	100	100	-	-	-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	0	100	100	100	-	-	-		
			06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	-	-	-	80	80	80		
			6.01.03.1.02	Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	162	162	162	162	-	-	-	Irban II	





**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.03.1.02	Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	-	-	-	80	80	80	Irban II	
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda	129	129	129	129	-	-	-	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	92	92	184	184	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
					Nilai Persepsi Korupsi	5,79	6,17	6,3	6,4	6,5	6,6	6,6		
				Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	Persentase Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	80	80	80	80	80	80		



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	100	100	100	-	-	-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	100	100	100	-	-	-		
			06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	-	-	-	80	80	160		
			6.01.03.1.02	Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	162	162	162	162	-	-	-	Irban II	
			6.01.03.1.02	Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	-	-	-	80	80	80	Irban II	



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2	2	2	2	-	-	-	Irban IV	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	90	90	180	Irban IV	Pemprov Kalbar
					<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		
			06.01.03	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan</b>	-	100	100	100	-	-	-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	100	100	100	-	-	-		



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	-	-	-	80	80	80		
			6.01.03.1.02	Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	162	162	162	162	-	-	-	Irban II	
			6.01.03.1.02	Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	-	-	-	80	80	80	Irban II	
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda	129	129	129	129	-	-	-	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	92	92	184	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar



**Bab II Capaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi  
Tahun 2023**

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023			
			6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	6	6	6	6	-	-	-	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	-	-	5	5	10	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	25	25	25	25	-	-	-	Irban I, Irban II, Irban V ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	-	141	141	28	Irban I, Irban II, Irban V ADUM	Pemprov Kalbar



#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat**

Rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra dan target kinerja yang dicapai oleh Inspektorat dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program prioritas kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Setelah melalui tahapan pembahasan Renja 2023 bersama TAPD, tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Musrenbang Tingkat Provinsi, maka ditetapkan untuk Inspektorat sebanyak 3 program di sektor pengawasan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terdapat beberapa perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi Renja yang siap untuk difinalisasikan dalam Rencana Kerja Inspektorat yang tersaji pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode					Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah	Catatan Penting
				Kegiatan											
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6					<b>Unsur Pengawasan</b>				<b>38.203.617.863,00</b>	<b>Unsur Pengawasan</b>				<b>38.203.617.863,00</b>	
	1				<b>Inspektorat Daerah</b>				<b>38.203.617.863,00</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				<b>38.203.617.863,00</b>	
		1			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>28.303.513.763,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>28.240.309.863,00</b>	
			1,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>466.255.000,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>466.255.000,00</b>	
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.569.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.634.200,00
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21.242.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	21.242.100,00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	21.285.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	21.285.900,00
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	21.285.900,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	21.285.900,00
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	22.149.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	22.149.800,00
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	133.465.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	115.465.500,00
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	221.256.300,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	Laporan	221.256.300,00
			1,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>22.774.456.606,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	22.269.551.406,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/ Bulan	22.269.551.406,00
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	11.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	11.000.000,00
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	376.888.900,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	417.508.900,00
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.961.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.961.000,00
				6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	21.950.900,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	21.950.900,00

				7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11 Laporan	79.104.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11	Laporan	79.104.400,00	
			1,03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>117.602.100,00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						
				1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.101.500,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	20.101.500,00	
				2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	51.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	Dokumen	51.000.000,00	
				4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	26.854.800,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	26.854.800,00	
				5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	19.645.800,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	19.645.800,00	
			1,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>685.835.200,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
				2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	91.378.000,00	
				3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pontianak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	43.597.300,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pontianak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	43.597.300,00	
				4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.572.400,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian #N/A	1	Dokumen	30.572.400,00	
				5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	109.302.500,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	109.302.500,00	
				6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pontianak	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang	37.525.500,00	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pontianak	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3	Orang	37.525.500,00	
				9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	372.416.500,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Orang	403.766.500,00	
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117 Orang	92.421.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117	Orang	92.359.881,00	
			1,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.745.557.299,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.065.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	80.065.500,00	
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	314.137.999,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	278.662.200,00	
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	124.811.800,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	104.811.800,00	
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Paket	120.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000	Paket	120.000.000,00	
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	178.647.400,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	177.960.348,00	



				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	45.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	45.000.000,00	
				8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pontianak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	90.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pontianak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	90.000.000,00	
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	525.000.000,00	
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	118 Dokumen	146.219.500,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	118	Dokumen	102.326.100,00	
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	146.675.100,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	106.025.400,00	
			1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>142.867.400,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
				5	Pengadaan Mebel	Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	42.214.400,00	Pengadaan Mebel	Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Paket	-	
				6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.653.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	111.589.800,00	
			1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.490.188.850,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.768.750,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	12.768.750,00	
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	343.742.100,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	332.640.000,00	
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.133.678.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	1.111.095.920,00	
			1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>880.751.308,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	65.844.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	59.995.000,00	
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	152.560.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	151.693.750,00	
				5	Pemeliharaan Mebel	Pontianak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	31.250.000,00	Pemeliharaan Mebel	Pontianak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit	31.250.000,00	
				6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	188 Unit	220.612.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	188	Unit	201.340.000,00	
				7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pontianak	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pontianak	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	3.000.000,00	
				8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pontianak	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	26.900.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pontianak	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	Unit	25.000.000,00	
				9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	380.584.808,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	380.584.808,00	

		2			<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>			<b>6.712.381.600,00</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>							
			1.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>			<b>4.091.870.100,00</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>							
				1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	110 Laporan	2.142.289.700,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	129	Laporan	2.180.407.100,00	
				2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	31 Laporan	510.969.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	31	Laporan	510.901.000,00	
				3	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	75.593.600,00	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	75.593.600,00	
				4	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	209.934.500,00	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3	Laporan	209.934.500,00	
				5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	11 Laporan	564.521.700,00	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	11	Laporan	565.999.000,00	
				6	Kerjasama Pengawasan Internal	Pontianak	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	58.878.500,00	Kerjasama Pengawasan Internal	Pontianak	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0	Kesepakatan	-	
				7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	529.683.100,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	Dokumen	524.461.100,00	
			1.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>			<b>2.620.511.500,00</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>							
				1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	169.364.500,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	149.964.500,00	
				2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	54 Laporan	2.451.147.000,00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	56	Laporan	2.595.535.900,00	
		3			<b>Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi</b>			<b>3.187.722.500,00</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>							
			1.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>			<b>396.094.700,00</b>	<b>Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>							
				1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	153.349.500,00	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	Rekomendasi	156.283.500,00	
				2	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	13 Rekomendasi	242.745.200,00	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	13	Rekomendasi	209.592.100,00	
			1.02		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>			<b>2.791.627.800,00</b>	<b>Asistensi dan Pendampingan</b>				2 Tahun			
				1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	92 Perangkat Daerah	355.722.200,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45	Perangkat Daerah	533.744.000,00	
				2		Dalam dan Luar Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,		431.331.600,00			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	45	Perangkat Daerah	307.444.200,00	

					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	90 Perangkat Daerah		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Kota	Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
				3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	702.918.100,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Kegiatan	719.394.900,00						
				4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	141 Perangkat Daerah	1.301.655.900,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45	Perangkat Daerah	1.224.052.600,00						
<b>Jumlah</b>									<b>38.203.617.863,00</b>	<b>Jumlah</b>									<b>38.203.617.863,00</b>		



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tema Mengawal 5 (lima) Arah Presiden. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pengawasan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
4. Asistensi dan Pendampingan.

Sasaran Pengawasan :

1. Pengawasan Umum;
2. Pengawasan Teknis.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, dan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam perumusan tujuan dan sasaran selama lima tahun kedepan adalah sebagai upaya dalam pencapaian visi dan misi daerah dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang, kelemahan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta strategi dan arah kebijakan daerah agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah semata-mata untuk mewujudkan visi dan misi daerah dengan mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi, serta kemampuan yang ada.

Ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran dibuktikan dengan tercapainya target



indikator kinerja, sesuai dengan penjelasan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Capaian indikator- indikator kinerja juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi program/kegiatanpelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

### 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah”**. Pernyataan tujuan tersebut mengandung arti bahwa hasil dari pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih baik, efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Indikator keberhasilan pencapaian tujuan, sebagai berikut:

- 1) Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja;
- 2) Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal;
- 3) Level Maturitas SPIP (Level);
- 4) Level Kapabilitas APIP; dan
- 5) Nilai Persepsi Korupsi.

**Tabel 3. 1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat**

Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja (Nilai)	14,44	15,00	15,50	16,00	16,50
	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal (Nilai)	6,62	7,32	7,62	8,32	8,62
	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	Nilai Persepsi Korupsi	6,17	6,3	6,4	6,5	6,6

Terdapat tiga sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana tertera pada dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Sasaran pertama adalah **“Meningkatnya nilai SAKIP Pengukuran Kinerja”** dengan indikator sasaran nilai SAKIP unsur pengukuran kinerja. Pernyataan sasaran tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasaran kedua adalah **“Meningkatnya nilai SAKIP Komponen Evaluasi**



**Internal**” dengan indikator sasaran nilai SAKIP unsur evaluasi internal. Pernyataan sasaran ini mengandung arti bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan mendorong instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif kepada masyarakat demi terwujudnya *Good Governance* melalui evaluasi internal atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran ketiga adalah **“Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu area penguatan pengawasan internal”** dengan indikator sasaran level kapabilitas APIP, level maturitas SPIP, dan nilai persepsi korupsi. Pernyataan sasaran ini mengandung arti bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mendukung terwujudnya reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi aparat pengawas internal pemerintah, implementasi sistem pengendalian internal dan penurunan tingkat korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 3. 2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023		
10.	<b>Pengawasan</b>								
10.3	Level maturitas SPIP.	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	Level 4	Level 4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.5	Level Kapabilitas APIP.	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	Level 4	Level 4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.6	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	13,72	14,44	15	15,5	16	16,5	16,5	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.7	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Kinerja (Nilai)	6,32	6,62	7,32	7,62	8,32	8,62	8,62	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.8	Nilai Persepsi Korupsi	5,79	6,17	6,3	6,4	6,5	6,6	6,6	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019

Sumber: BAB VIII, Tabel 8.2 Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

### 3.4 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi



satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, dan Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Rencana program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Program-program tersebut sebagai relevansi pencapaian tujuan dan sasaran dan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan, meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; dan
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, meliputi Kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Kegiatan Asistensi dan Pendampingan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 3.3, sebagai berikut:

Tabel 3. 3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

KODE					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	JUMLAH						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15
6					Unsur Pengawasan	APBD		27.319.354.476,00	37.896.532.484,00	380.991.300,00	-	-	38.277.523.784,00	42.105.276.162,40
	01				Inspektorat Daerah			27.319.354.476,00	37.896.532.484,00	380.991.300,00	-	-	38.277.523.784,00	42.105.276.162,40
		01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.082.374.484,00	380.991.300,00	-	-	28.363.365.784,00	31.199.702.362,40
			1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				405.635.181,00	-	-	-	405.635.181,00	446.198.699,10
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				36.884.200,00				36.884.200,00	40.572.620,00
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				17.257.581,00				17.257.581,00	18.983.339,10
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				17.235.900,00				17.235.900,00	18.959.490,00
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				17.235.900,00				17.235.900,00	18.959.490,00
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				18.099.800,00				18.099.800,00	19.909.780,00
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				110.065.500,00				110.065.500,00	121.072.050,00
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				188.856.300,00				188.856.300,00	207.741.930,00
			1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.193.769.627,00	-	-	-	23.193.769.627,00	25.513.146.589,70
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.667.144.427,00				22.667.144.427,00	24.933.858.869,70
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11.000.000,00				11.000.000,00	12.100.000,00
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				417.508.900,00				417.508.900,00	459.259.790,00
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.261.000,00				13.261.000,00	14.587.100,00
				06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				21.950.900,00				21.950.900,00	24.145.990,00
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				62.904.400,00				62.904.400,00	69.194.840,00
			1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				108.152.100,00	-	-	-	108.152.100,00	118.967.310,00
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				16.051.500,00				16.051.500,00	17.656.650,00
				02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				51.000.000,00				51.000.000,00	56.100.000,00
				04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				21.454.800,00				21.454.800,00	23.600.280,00
				05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				19.645.800,00				19.645.800,00	21.610.380,00
			1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				672.422.300,00	-	-	-	672.422.300,00	739.664.530,00
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				44.952.000,00				44.952.000,00	49.447.200,00
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				35.497.300,00				35.497.300,00	39.047.030,00



			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				25.172.400,00				25.172.400,00	27.689.640,00
			05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				85.876.500,00				85.876.500,00	94.464.150,00
			06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				-				-	-
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				403.766.500,00				403.766.500,00	444.143.150,00
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				77.157.600,00				77.157.600,00	84.873.360,00
		<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.595.051.348,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.595.051.348,00</b>	<b>1.754.556.482,80</b>
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				80.065.500,00				80.065.500,00	88.072.050,00
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				278.662.200,00				278.662.200,00	306.528.420,00
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				94.311.800,00				94.311.800,00	103.742.980,00
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.000.000,00				120.000.000,00	132.000.000,00
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				177.960.348,00				177.960.348,00	195.756.382,80
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				45.000.000,00				45.000.000,00	49.500.000,00
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				90.000.000,00				90.000.000,00	99.000.000,00
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				525.000.000,00				525.000.000,00	577.500.000,00
			10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				94.226.100,00				94.226.100,00	103.648.710,00
			11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				89.825.400,00				89.825.400,00	98.807.940,00
		<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>203.200,00</b>	<b>80.991.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.194.500,00</b>	<b>89.313.950,00</b>
			05	Pengadaan Mebel				-	-			-	-
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				203.200,00	80.991.300,00			81.194.500,00	89.313.950,00
		<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.456.504.670,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.456.504.670,00</b>	<b>1.602.155.137,00</b>
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.768.750,00				12.768.750,00	14.045.625,00
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				332.640.000,00				332.640.000,00	365.904.000,00
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.111.095.920,00				1.111.095.920,00	1.222.205.512,00
		<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>650.636.058,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850.636.058,00</b>	<b>935.699.663,80</b>
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				59.995.000,00				59.995.000,00	65.994.500,00
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				151.693.750,00				151.693.750,00	166.863.125,00
			05	Pemeliharaan Mebel				25.625.000,00				25.625.000,00	28.187.500,00
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				224.737.500,00				224.737.500,00	247.211.250,00
			07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000,00				3.000.000,00	3.300.000,00
			08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000,00				25.000.000,00	27.500.000,00
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				160.584.808,00	200.000.000,00			360.584.808,00	396.643.288,80
		<b>02</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>				<b>6.791.196.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.791.196.700,00</b>	<b>7.470.316.370,00</b>
		<b>1.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>				<b>4.059.196.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.059.196.300,00</b>	<b>4.465.115.930,00</b>
			01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				2.192.407.100,00				2.192.407.100,00	2.411.647.810,00
			02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				510.901.000,00				510.901.000,00	561.991.100,00
			03	Reviu Laporan Kinerja				75.593.600,00				75.593.600,00	83.152.960,00
			04	Reviu Laporan Keuangan				209.934.500,00				209.934.500,00	230.927.950,00

			05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota					553.999.000,00			553.999.000,00	<b>609.398.900,00</b>
			06	Kerjasama Pengawasan Internal					-			-	-
			07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					516.361.100,00			516.361.100,00	<b>567.997.210,00</b>
		<b>1.02</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>					<b>2.732.000.400,00</b>			<b>2.732.000.400,00</b>	<b>3.005.200.440,00</b>
			01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					136.464.500,00			136.464.500,00	<b>150.110.950,00</b>
			02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					2.595.535.900,00			2.595.535.900,00	<b>2.855.089.490,00</b>
		<b>03</b>		<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>					<b>3.022.961.300,00</b>			<b>3.022.961.300,00</b>	<b>3.325.257.430,00</b>
		<b>1.01</b>		<b>Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>					<b>361.825.600,00</b>			<b>361.825.600,00</b>	<b>398.008.160,00</b>
			01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan					156.283.500,00			156.283.500,00	<b>171.911.850,00</b>
			02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan					205.542.100,00			205.542.100,00	<b>226.096.310,00</b>
		<b>1.02</b>		<b>Asistensi dan Pendampingan</b>					<b>2.661.135.700,00</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>2.761.135.700,00</b>	<b>3.037.249.270,00</b>
			01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					533.744.000,00			533.744.000,00	<b>587.118.400,00</b>
			02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					307.444.200,00			307.444.200,00	<b>338.188.620,00</b>
			03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					719.394.900,00			719.394.900,00	<b>791.334.390,00</b>
			04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					1.100.552.600,00	100.000.000,00		1.200.552.600,00	<b>1.320.607.860,00</b>
<b>Jumlah</b>							<b>27.319.354.476,00</b>	<b>37.896.532.484,00</b>				<b>38.277.523.784,00</b>	<b>42.105.276.162,40</b>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menitikberatkan pada pencapaian keberhasilan *output* dan *outcome* dalam bidang pengawasan. Program yang disusun merupakan suatu rangkaian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka satu tahun. Setiap program kerja terdiri dari beberapa kumpulan kegiatan yang relevan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Program Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Inspektorat Provinsi Tahun 2018-2023. Program ini disusun melingkupi kumpulan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga visi dan misi dapat terlaksana/terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Provinsi mengimplementasikan program dan kegiatan ke dalam Rencana Kinerja Inspektorat Provinsi Tahun 2023 yang mencakup 3 program dengan 12 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan.

Berikut dapat digambarkan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2023 serta Indikator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 4.1, sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

KODE					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	JUMLAH						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15
6					Unsur Pengawasan	APBD		27.319.354.476,00	37.896.532.484,00	380.991.300,00	-	-	38.277.523.784,00	42.105.276.162,40
	01				Inspektorat Daerah			27.319.354.476,00	37.896.532.484,00	380.991.300,00	-	-	38.277.523.784,00	42.105.276.162,40
		01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.082.374.484,00	380.991.300,00	-	-	28.363.365.784,00	31.199.702.362,40
			1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				405.635.181,00	-	-	-	405.635.181,00	446.198.699,10
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				36.884.200,00				36.884.200,00	40.572.620,00
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				17.257.581,00				17.257.581,00	18.983.339,10
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				17.235.900,00				17.235.900,00	18.959.490,00
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				17.235.900,00				17.235.900,00	18.959.490,00
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				18.099.800,00				18.099.800,00	19.909.780,00
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				110.065.500,00				110.065.500,00	121.072.050,00
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				188.856.300,00				188.856.300,00	207.741.930,00
			1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.193.769.627,00	-	-	-	23.193.769.627,00	25.513.146.589,70
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.667.144.427,00				22.667.144.427,00	24.933.858.869,70
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11.000.000,00				11.000.000,00	12.100.000,00
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				417.508.900,00				417.508.900,00	459.259.790,00
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.261.000,00				13.261.000,00	14.587.100,00
				06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				21.950.900,00				21.950.900,00	24.145.990,00
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				62.904.400,00				62.904.400,00	69.194.840,00
			1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				108.152.100,00	-	-	-	108.152.100,00	118.967.310,00
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				16.051.500,00				16.051.500,00	17.656.650,00
				02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				51.000.000,00				51.000.000,00	56.100.000,00
				04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				21.454.800,00				21.454.800,00	23.600.280,00
				05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				19.645.800,00				19.645.800,00	21.610.380,00
			1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				672.422.300,00	-	-	-	672.422.300,00	739.664.530,00
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				44.952.000,00				44.952.000,00	49.447.200,00
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				35.497.300,00				35.497.300,00	39.047.030,00
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				25.172.400,00				25.172.400,00	27.689.640,00

			05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					85.876.500,00				85.876.500,00	94.464.150,00
			06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun					-				-	-
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					403.766.500,00				403.766.500,00	444.143.150,00
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					77.157.600,00				77.157.600,00	84.873.360,00
			<b>1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>1.595.051.348,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.595.051.348,00</b>	<b>1.754.556.482,80</b>
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					80.065.500,00				80.065.500,00	88.072.050,00
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					278.662.200,00				278.662.200,00	306.528.420,00
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					94.311.800,00				94.311.800,00	103.742.980,00
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					120.000.000,00				120.000.000,00	132.000.000,00
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan					177.960.348,00				177.960.348,00	195.756.382,80
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					45.000.000,00				45.000.000,00	49.500.000,00
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					90.000.000,00				90.000.000,00	99.000.000,00
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					525.000.000,00				525.000.000,00	577.500.000,00
			10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					94.226.100,00				94.226.100,00	103.648.710,00
			11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					89.825.400,00				89.825.400,00	98.807.940,00
			<b>1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>203.200,00</b>	<b>80.991.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.194.500,00</b>	<b>89.313.950,00</b>
			05	Pengadaan Mebel					-	-			-	-
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					203.200,00	80.991.300,00			81.194.500,00	89.313.950,00
			<b>1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.456.504.670,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.456.504.670,00</b>	<b>1.602.155.137,00</b>
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12.768.750,00				12.768.750,00	14.045.625,00
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					332.640.000,00				332.640.000,00	365.904.000,00
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.111.095.920,00				1.111.095.920,00	1.222.205.512,00
			<b>1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>650.636.058,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850.636.058,00</b>	<b>935.699.663,80</b>
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					59.995.000,00				59.995.000,00	65.994.500,00
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					151.693.750,00				151.693.750,00	166.863.125,00
			05	Pemeliharaan Mebel					25.625.000,00				25.625.000,00	28.187.500,00
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					224.737.500,00				224.737.500,00	247.211.250,00
			07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					3.000.000,00				3.000.000,00	3.300.000,00
			08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					25.000.000,00				25.000.000,00	27.500.000,00
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					160.584.808,00	200.000.000,00			360.584.808,00	396.643.288,80
			<b>02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>					<b>6.791.196.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.791.196.700,00</b>	<b>7.470.316.370,00</b>
			<b>1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>					<b>4.059.196.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.059.196.300,00</b>	<b>4.465.115.930,00</b>
			01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					2.192.407.100,00				2.192.407.100,00	2.411.647.810,00
			02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					510.901.000,00				510.901.000,00	561.991.100,00
			03	Reviu Laporan Kinerja					75.593.600,00				75.593.600,00	83.152.960,00
			04	Reviu Laporan Keuangan					209.934.500,00				209.934.500,00	230.927.950,00
			05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota					553.999.000,00				553.999.000,00	609.398.900,00

			06	Kerjasama Pengawasan Internal				-				-	-
			07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				516.361.100,00				516.361.100,00	567.997.210,00
		1.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>				<b>2.732.000.400,00</b>				<b>2.732.000.400,00</b>	<b>3.005.200.440,00</b>
			01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				136.464.500,00				136.464.500,00	150.110.950,00
			02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				2.595.535.900,00				2.595.535.900,00	2.855.089.490,00
		03		<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>				<b>3.022.961.300,00</b>				<b>3.022.961.300,00</b>	<b>3.325.257.430,00</b>
		1.01		<b>Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>				<b>361.825.600,00</b>				<b>361.825.600,00</b>	<b>398.008.160,00</b>
			01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan				156.283.500,00				156.283.500,00	171.911.850,00
			02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitas Pengawasan				205.542.100,00				205.542.100,00	226.096.310,00
		1.02		<b>Asistensi dan Pendampingan</b>				<b>2.661.135.700,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			<b>2.761.135.700,00</b>	<b>3.037.249.270,00</b>
			01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				533.744.000,00				533.744.000,00	587.118.400,00
			02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				307.444.200,00				307.444.200,00	338.188.620,00
			03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				719.394.900,00				719.394.900,00	791.334.390,00
			04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1.100.552.600,00	100.000.000,00			1.200.552.600,00	1.320.607.860,00
<b>Jumlah</b>								<b>27.319.354.476,00</b>	<b>37.896.532.484,00</b>			<b>38.277.523.784,00</b>	<b>42.105.276.162,40</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 merupakan proses perencanaan tahunan terhadap kinerja pengawasan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas pengawasan meliputi pelaksanaan sebagian kewenangan otonomi provinsi dalam bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota serta melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah melalui Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi ini berisikan rencana program dan kegiatan pengawasan serta perencanaan anggaran selama periode 1 (satu) tahun anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Seluruh komponen Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat wajib untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud dengan target keluaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renja ini merupakan suatu langkah yang sistematis dalam rangka meningkatkan dan mencapai kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai harapan.

Pontianak, 30 Juli 2022

**INSPEKTUR**  
  
**Dra. MARLYNA, M.Si., CRA., CRP., CGCAE**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19670115 198603 2 008